

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN 2018



**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 39/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BB Pengkajian memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Oleh karena itu, BB Pengkajian juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja termasuk BPTP.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian Tahun 2018 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BB Pengkajian selanjutnya.

Bogor, Januari 2019

Kepala BB Pengkajian,



Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 39/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BB Pengkajian memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BB Pengkajian diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BB Pengkajian TA. 2018.

Sesuai dengan Renstra Balai Besar Pengkajian tahun 2015-2019, pada tahun 2018 BB Pengkajian mengimplementasikan program utama Badan Litbang Pertanian yaitu "Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan" melalui Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2018 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **118,4 persen**. Rata – rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan **sangat berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BB Pengkajian telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak lima kali. DIPA lingkup BB Pengkajian yang awalnya sebesar Rp 728.462.417.000,- dalam perjalanannya mengalami revisi yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: tambahan dana kegiatan SMARTD, refocusing untuk tunjangan kinerja, program BEKERJA, dan hibah. Berdasarkan revisi kelima yang merupakan revisi terakhir pada bulan Desember 2018, pagu anggaran sebesar Rp 824.460.053.000,-. Realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan data PMK 249/2011 sebesar Rp 686.397.000.000 (**83,3 persen**).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2018 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan pengkajian dan diseminasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BB Pengkajian dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Pengkajian	3
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan	5
2.4. Sasaran	5
2.5. Kegiatan BB Pengkajian	5
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Berbasis <i>Outcome</i>	11
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja BB Pengkajian dengan Target Renstra 2015-2019	30
3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	32
3.1.3. Capaian Kinerja BB Pengkajian Lainnya	33
3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	35
3.2. Akuntabilitas Keuangan	37
3.2.1. Realisasi Anggaran	37
3.2.2. Pengelolaan PNB	42
3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri	43
IV. PENUTUP	45
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	45
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
Tabel 1.	Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi BB Pengkajian Tahun 2018	6
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja BB Pengkajian Tahun 2018	7
Tabel 3.	Revisi Anggaran BB Pengkajian Tahun 2018	7
Tabel 4.	Pagu Anggaran Berdasarkan <i>Output</i> Kegiatan TA. 2018	8
Tabel 5.	Pengukuran Kinerja BB Pengkajian Tahun 2018	12
Tabel 6.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi	13
Tabel 7.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan	14
Tabel 8.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Paket Teknologi Pertanian yang Dihasilkan Terhadap Pengkajian Teknologi Pertanian yang Dilakukan Pada Tahun Berjalan	22
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan	26
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian	28
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Temuan Itjen Atas Implementasi SAKIP yang terjadi berulang	29
Tabel 12.	Capaian Kinerja BB Pengkajian dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2015 – 2019	31
Tabel 13.	Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Balai Besar Pengkajian 2018	36
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Berdasarkan <i>Output</i> Kegiatan Lingkup BB Pengkajian Tahun 2018	37
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BB Pengkajian Tahun 2018	38
Tabel 16.	Realisasi kegiatan BEKERJA 2018	39
Tabel 17.	Realisasi Anggaran per BPTP Tahun 2018	40
Tabel 18.	Realisasi PNBP lingkup BB Pengkajian Tahun 2018	42
Tabel 19.	Hibah Langsung Luar negeri lingkup BB Pengkajian 2018	43

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1.	Sistem Perencanaan Nasional	3
Gambar 2.	Perbandingan anggaran kegiatan pengkajian dan diseminasi lingkup BB Pengkajian tahun 2014 – 2018	15
Gambar 3.	Bersama Bupati Bengkayang, panen jagung Bima 19 URI pada kegiatan SUP-I di wilayah perbatasan Kalimantan Barat	20
Gambar 4.	Budidaya padi Largo Super di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat	21
Gambar 5.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya	26
Gambar 6.	Penganugerahan Barang Milik Negara Awards Bagi Satuan Kerja di Lingkungan KPKNL Serang	34
Gambar 7.	Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian mendapatkan Predikat WBK pada Forum Nasional SPIP tahun 2018	34

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
Lampiran 1.	Struktur Organisasi BB Pengkajian berdasarkan Permentan No. 39/Permentan/OT.140/3/201	47
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja per Tanggal 5 Januari 2018	48
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja per Tanggal 5 Juli 2018	50
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja per Bulan Desember 2018	52
Lampiran 5.	Sertifikat Paten Sederhana Formula Minuman Penyegar Kopi Lada	54
Lampiran 6.	Piagam Penghargaan Bupati Pelalawan Riau atas kerjasamanya dalam Pengembangan Perbenihan Padi di Kabupaten Pelalawan	55
Lampiran 7.	Sertifikat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018	56
Lampiran 8.	Sertifikat Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2	57

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2018 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BB Pengkajian tahun 2018 merupakan LAKIN tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. LAKIN BB Pengkajian yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, PMK 29 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL, Permentan No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BB Pengkajian menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan

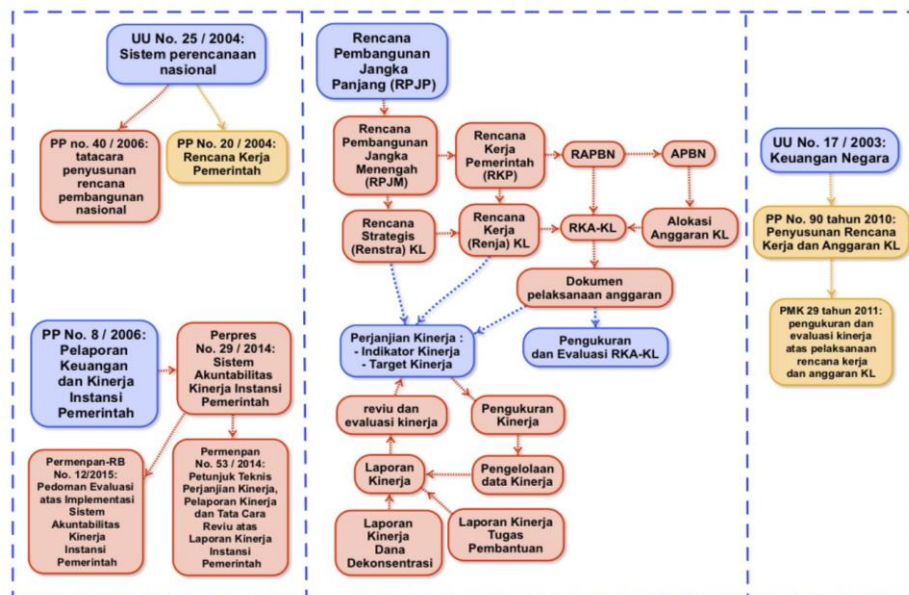
perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu perbandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Sistem perencanaan nasional dapat dilihat pada Gambar 1, diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja, (2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%) yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya serta (5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan.



Gambar 1. Sistem Perencanaan Nasional

Nilai dari evaluasi LAKIN adalah AA (sangat memuaskan) skor > 90–100, A (memuaskan) skor 80–90, BB (sangat baik) skor 70–80, B (baik) skor 60 – 70), CC (memadai) skor 50–60, C (kurang) skor >30–50, dan nilai D (sangat kurang) skor 0–30.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Pengkajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 39/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, tugas utama BB Pengkajian adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BB Pengkajian memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (2) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (3) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (4) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan, (5) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional, dan (6) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Guna menyinergikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang mempunyai keunggulan di tingkat nasional, maka BB Pengkajian mengoordinasikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik lokasi. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 161/2006 BB Pengkajian diberi mandat untuk membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP). Pemberian mandat BB Pengkajian untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP terkait erat dengan tekad Badan Litbang Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada di Indonesia. Lebih lanjut lagi, fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya termasuk di dalamnya melaksanakan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian (Permentan No. 19/Permentan/OT.020/5/2017).

Struktur organisasi BB Pengkajian diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Pimpinan tertinggi adalah Kepala BB Pengkajian, membawahi Kabag Tata Usaha (TU), Kabid Program dan Evaluasi (PE), Kabid Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian (KSPHP). Kabag TU membawahi Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan, Kasubbag Kepegawaian, dan Kasubbag Keuangan. Kabid PE membawahi Kasi Program dan Kasi Evaluasi. Sedangkan Kabid KSPHP membawahi Kasi Kerjasama Pengkajian dan Kasi Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Sementara itu Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung di bawah Kepala Balai Besar Pengkajian. Struktur organisasi BB Pengkajian dapat dilihat pada Lampiran 1.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BB Pengkajian secara hirarkis merupakan *Business Unit* Badan Litbang Pertanian. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka visi dan misi yang disusun BB Pengkajian mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian serta visi dan misi Badan Litbang Pertanian 2015 – 2019 yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan perdesaan.

Oleh karena itu, visi dan misi yang ditetapkan harus mengakomodir situasi dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan.

2.1. Visi

Visi BB Pengkajian adalah “Menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.

2.2. Misi

Misi BB Pengkajian adalah: (1) menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi yang memiliki *scientific and impact recognition* dengan produktivitas dan efisiensi tinggi, dan (2) Hilirisasi dan massalisasi teknologi pertanian spesifik lokasi sebagai solusi menyeluruh permasalahan pertanian yang memiliki *impact recognition*.

2.3. Tujuan

Tujuan BB Pengkajian adalah: (1) menyediakan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, (2) menyediakan teknologi spesifik lokasi yang lebih produktif dan efisien serta ramah lingkungan dan (3) mempercepat dan meningkatkan diseminasi inovasi teknologi di tingkat oengguna.

2.4. Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BB Pengkajian, maka sasaran BB Pengkajian adalah: (1) dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian, (2) meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, dan (3) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

2.5. Kegiatan BB Pengkajian

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2018, lingkup BB

Pengkajian mengimplementasikan **Kegiatan Prioritas Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian** melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) lingkup BB Pengkajian tahun 2018. Kegiatan utama BB Pengkajian pada tahun 2018 yang mencakup kegiatan pengkajian dan diseminasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi lingkup BB Pengkajian Tahun 2018

No	Judul Kegiatan Tahun 2018
1	Teknologi Spesifik Lokasi
2	Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna
3	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
5	Model Pengembangan Pertanian Bioindustri
6	Produksi Benih Sumber
7	Taman Sains Pertanian (TSP)
8	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
9	Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri di Daerah Perbatasan
10	Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian
11	Sumberdaya Genetik Yang Terkonservasi dan Terdokumentasi
12	Dukungan inovasi teknologi untuk peningkatan IP kawasan pertanian
13	Transfer Inovasi Teknologi
14	Inovasi Perbenihan dan Perbibitan
15	Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis
16	Inovasi Perbenihan dan Perbibitan komoditas unggulan (Non Strategis)
17	Produksi Benih Bawang, Kentang, Sayuran lainnya, Buah Tropika dan Sub Tropika, dan Tanaman Industri Perkebunan
18	Layanan Internal (Overhead)
19	Layanan Perkantoran

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di BB Pengkajian disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BB Pengkajian untuk tahun 2018 melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BB Pengkajian.

Seiring dengan adanya dinamika anggaran, maka dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Juli dan Desember 2018 dari anggaran semula

sebesar Rp 728.462.417.000,- menjadi Rp 816.589.369.000,- dan kemudian menjadi Rp 824.460.053.000,-. Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat pada Lampiran 2, 3 dan 4. Sedangkan sasaran dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja BB Pengkajian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BB Pengkajian Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian	Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	431 paket teknologi
		Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	100%
		Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	34 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	3 Nilai IKM
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	5 Temuan

Alokasi anggaran BB Pengkajian pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember telah mengalami lima kali revisi, yang semula sebesar Rp 728.462.417.000,- setelah revisi kelima yang merupakan revisi terakhir menjadi Rp 824.460.053.000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Anggaran BB Pengkajian Tahun 2018

No	Bulan	Kondisi Revisi Anggaran
1	Desember 2017	DIPA Awal
2	Mei 2018	Revisi I : Adanya tambahan dana kegiatan SMARTD, penambahan pagu anggaran manajemen, pengalihan anggaran TTP dan pengadaan kendaraan bermotor roda 4
3	Juni 2018	Revisi II : Refokusing untuk Tunjangan Kinerja dan Program BEKERJA
4	September- Oktober 2018	Revisi III : Pengurangan / Penambahan PNB
5	Oktober 2018	Revisi IV : Penambahan / Pengurangan Gaji
6	Desember 2018	Revisi V : Hibah

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, anggaran yang dikelola BB Pengkajian sebesar Rp 824.460.053.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan *output* kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan TA. 2018

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	%
1801	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	824.460.053.000	100
201	Teknologi Spesifik Lokasi	18.197.868.000	2,21
202	Teknologi Yang Terdiseminasi ke Pengguna	60.563.809.000	7,35
203	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	2.245.824.000	0,27
204	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	6.016.145.000	0,73
205	Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan terintegrasi Desa Mandiri Benih	2.051.240.000	0,25
206	Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai	5.554.395.000	0,67
207	Taman Sains Pertanian (TSP)	3.850.000.000	0,47
208	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	17.741.049.000	2,15
209	SDG Yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	2.653.670.000	0,32
210	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	6.349.590.000	0,77
211	Dukungan inovasi teknologi untuk peningkatan IP kawasan pertanian	7.944.173.000	0,96
212	Transfer Inovasi Teknologi	19.448.250.000	2,36
213	Inovasi Perbenihan dan Perbibitan	12.803.403.000	1,55
216	Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis	15.161.734.000	1,84
217	Inovasi Perbenihan dan Perbibitan komoditas unggulan (Non Strategis)	189.237.968.000	22,95
301	Produksi Benih Bawang	7.304.975.000	0,89
302	Produksi Benih Kentang	5.093.237.000	0,62
303	Produksi Benih Sayuran Lainnya	445.710.000	0,05
304	Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	5.333.305.000	0,65
307	Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan	4.776.224.000	0,58
951	Layanan Internal (Overhead)	147.817.290.000	17,93
994	Layanan Perkantoran	283.870.194.000	34,43

Adapun masing-masing kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BB Pengkajian per *output* kegiatan utama sebagai berikut:

1. Teknologi Spesifik Lokasi, dengan target *output* adalah tersedianya 105 teknologi spesifik lokasi di lingkup BB Pengkajian.
2. Teknologi yang Terdiseminasi ke Pengguna, dengan target *output* adalah terdiseminasikannya 190 teknologi komoditas strategis ke pengguna melalui kegiatan Taman Agro Inovasi, Koordinasi Penyuluh, UPSUS, dan pola tanam.
3. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian, target *output*nya adalah 38 rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian spesifik lokasi.
4. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi, dengan target *output*nya adalah tersedianya 66 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi di lingkup BB Pengkajian.
5. Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih, target *output*nya adalah terlaksananya kegiatan Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih di 15 BPTP (Sumut, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Sultra, Bali, NTB, NTT, Papua).
6. Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai, dengan target *output* tersedianya produksi benih sumber sebanyak 307 ton yang terdiri dari ton benih sumber padi, ton benih sumber jagung, ton benih sumber kedelai.
7. Taman Sains Pertanian, dengan target *output* tersedianya Taman Sains Pertanian di Provinsi Sumatera Barat, dan TSTPN di Cimanggu Bogor.
8. Taman Teknologi Pertanian, dengan target *output* tersedianya TTP di 13 Kabupaten, yang berada di BPTP Riau (1 Kabupaten), Jambi (1 Kabupaten), Sumsel (2 Kabupaten), Jateng (1 Kabupaten), Yogyakarta (1 Kabupaten), Jatim (2 Kabupaten), Bali (1 Kabupaten), NTB (1 Kabupaten), Kaltim (1 Kabupaten), Sulsel (1 Kabupaten), dan Sultra (1 Kabupaten).
9. SDG yang terkonservasi dan terdokumentasi, target *output* tersedianya 178 akses di 33 BPTP.
10. Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan dengan target *output* tersedianya 14 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan di 12 BPTP dan BB Pengkajian.
11. Dukungan Inovasi Teknologi untuk Peningkatan IP Kawasan Pertanian, target *output* peningkatan IP di 34 provinsi.
12. Transfer Inovasi Teknologi, dengan target *output* terlaksanakan transfer inovasi teknologi di 34 provinsi.

13. Inovasi Perbenihan dan Perbibitan, dengan target *output* sebanyak 1.031,37 ton di 32 BPTP.
14. Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis dengan target sebanyak 32 unit di 32 BPTP.
15. Inovasi Perbenihan dan Perbibitan komoditas unggulan (Non Strategis), dengan target sebanyak 1.878.450 ekor di sembilan BPTP, yaitu BPTP Sumut (3.500 ekor), Lampung (493.300 ekor), Banten (3.500 ekor), Jabar (611.000 ekor), Jateng (31.500 ekor), Jatim (31.500 ekor), NTB (679.650 ekor), Sulsel (21.000 ekor), dan Gorontalo (3.500 ekor).
16. Produksi Benih Bawang, dengan target *output* tersedianya 73.016 kg di 11 BPTP, yakni BPTP Sumut (120 kg), Sumbar (10 kg), Jambi (10.020 kg), Jabar (25 kg), Jateng (6 kg), Jatim (25.050 kg), NTB (37.575 kg), NTT (50 kg), Sulteng (40 kg), Sulut (40 kg), dan Sulsel (80 kg).
17. Produksi Benih Kentang, dengan target *output* adalah tersedianya benih kentang sebanyak 195.600 G0 di empat BPTP, yakni BPTP Sumbar (20.000 G0), Jambi (50.000 G0), Jabar (80.000 G0) dan Jateng (45.600 G0).
18. Produksi Benih Sayuran Lainnya, dengan target *output* tersedianya benih sayuran sebanyak 62.500 batang di enam BPTP, yakni BPTP Banten (20.000 batang), Jabar (20.000 batang), Sumut (5.000 batang), Sumbar (10.600 batang), Bengkulu (2.000 batang) dan Kalsel (4.900 batang).
19. Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika, target *output* tersedianya benih buah tropika dan sub tropika sebanyak 359.653 batang di 22 BPTP.
20. Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan, dengan target *output* tersedianya benih tanaman industri perkebunan sebanyak 622.585 pohon di 20 BPTP.
21. Layanan Internal (*Overhead*), dengan target *output* adalah terlaksananya 34 layanan internal di BB Pengkajian dan 33 BPTP.
22. Layanan Perkantoran, dengan target *output* adalah terlaksananya kegiatan layanan perkantoran lingkup BB Pengkajian selama 12 bulan layanan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Berbasis *Outcome*

BB Pengkajian senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2018. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BB Pengkajian.

Pada tahun anggaran 2018, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2015-2019 yang telah direvisi, BB Pengkajian telah menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian, (2) Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Selanjutnya, ketiga sasaran tersebut diukur dengan lima indikator kinerja *output* berupa: (1) Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir), (2) Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan, (3) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, (4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan (5) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan lingkup BB Pengkajian, capaian indikator kinerja kegiatan utama BB Pengkajian tahun 2018 disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BB Pengkajian tahun 2018 rata-rata melebihi 100% (118,4%) atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (2) **berhasil** jika capaian 80-100%; (3) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (4) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pengkajian, dan

diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup BB Pengkajian. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BB Pengkajian Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian	Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) (Paket Teknologi)	431	1.246	289,1
		Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	100	100	100
		Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan (Rekomendasi Kebijakan)	34	35	102,9
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Nilai IKM)	3	3	100
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Temuan)	5	-	0
Rata-Rata					118,4

Berdasarkan Tabel 5, secara umum capaian kinerja untuk sasaran BB Pengkajian masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai di atas 100%. Indikator

kinerja yang dapat mencapai target 100% adalah: Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian. Sedangkan indikator kinerja yang memiliki kinerja lebih dari 100% (sangat berhasil) yaitu Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Namun kinerja indikator Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang sebesar 0% karena capaiannya tidak dapat diukur.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BB Pengkajian tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian

Sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian terdiri dari indikator kinerja: (1) jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir), (2) rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan, dan (3) jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	Paket Teknologi	431	1.246	289,1
Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	%	100	100	100
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan	34	35	102,9

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, diukur dengan tiga indikator kinerja sasaran. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BB Pengkajian berhasil memperoleh 1.246 jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan dari 431 paket teknologi yang ditargetkan (289,1%), memiliki rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian yang dilakukan sebesar 100%, dan menghasilkan 35 rekomendasi kebijakan dari 34 rekomendasi yang ditargetkan (102,9%) (Tabel 6).

Capaian masing-masing indikator dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)

Sampai dengan tahun 2018, telah tercapai 1.246 paket teknologi dari target 431 paket teknologi yang dimanfaatkan (289,1%). Capaian ini merupakan akumulasi paket teknologi yang dimanfaatkan pada tahun 2014 – 2018 (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	Paket Teknologi	431	1.246	289,1

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan kesesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat.

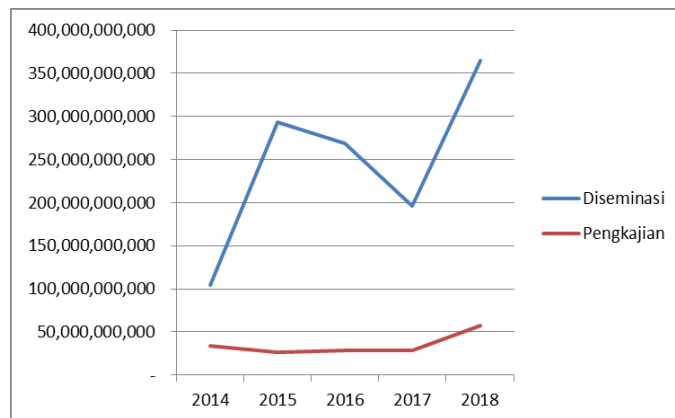
Sedangkan teknologi yang didiseminasikan adalah hasil pengkajian yang disebarluaskan melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena BB Pengkajian merupakan unit kerja yang memiliki tugas melakukan pengkajian dan diseminasi langsung pada pengguna, maka teknologi yang didiseminasikan sekaligus merupakan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbagai paket teknologi spesifik lokasi yang telah dimanfaatkan oleh petani, masyarakat umum, dan pemerintah daerah, menjadi pendorong perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian.

Nilai capaian kinerja indikator ini sebesar 289,1%, disebabkan oleh banyaknya teknologi yang dimanfaatkan sebagai dampak dari kegiatan diseminasi yang secara masif dilakukan BB Pengkajian selama ini. Diseminasi teknologi inovasi pertanian tidak hanya bersumber dari teknologi hasil kajian BPTP lingkup BB Pengkajian. Hal ini terjadi mengingat diseminasi teknologi Kementerian Pertanian pada umumnya, dan teknologi Balitbangtan pada khususnya ikut mengakselerasi pemanfaatan teknologi pertanian yang sudah berada pada level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*technology readiness*) yang masuk klasifikasi siap didiseminasi.

Beberapa program strategis Kementerian Pertanian sejak tahun 2014, sangat kuat mewarnai kebijakan pembangunan pertanian yang menuntut dukungan signifikan inovasi teknologi di lapangan, sehingga banyak terobosan seperti pemanfaatan secara masif teknologi perbenihan, percepatan pemanfaatan

varietas unggul baru, beberapa teknologi budidaya (Jarwo Super, Proliga, TSS, BEKERJA), alat dan mesin pertanian, serta kegiatan pendampingan teknologi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

Dari aspek wilayah penganggaran, kegiatan penerapan diseminasi pertanian cenderung mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk mempercepat peran inovasi. Sehingga bila dibandingkan dengan anggaran kegiatan pengkajian, kegiatan diseminasi cenderung meningkat signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 (Gambar 2).



Gambar 2. Perbandingan anggaran kegiatan pengkajian dan diseminasi lingkup BB Pengkajian tahun 2014 – 2018

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru BB Pengkajian pada tahun 2018.

Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

Paket teknologi tanaman pangan. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi varietas padi unggul baru tahan salin yang beradaptasi di lahan pesisir di Riau; teknologi PTT padi sawah di Sumatera Utara; teknologi pemanfaatan kompos untuk tanaman pangan di Bengkulu; teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman kedelai di Bengkulu; teknologi pengembangan komoditas padi di Bengkulu; teknologi VUB padi baru di Sumatera Selatan; teknologi PTT kedelai di Sumatera Selatan; teknologi budidaya padi di Sumatera Selatan; teknologi PTT jagung di Sumatera Selatan; teknologi budidaya padi sawah di Bangka Belitung; teknologi budidaya padi sawah di Banten; teknologi tumpangsari jagung dan kedelai di Banten; teknologi budidaya ubi jalar di DKI; teknologi Jarwo Super di Jawa Tengah; teknologi peningkatan luas tambah tanam dan produksi mendukung kegiatan UPSUS di Jawa Timur; teknologi PTT tanaman padi, jagung, kedelai dan ubi kayu di Jawa

Tengah; teknologi budidaya padi di Kabupaten Sleman Yogyakarta; teknologi integrasi padi-sapi di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta; teknologi tanam jagung sistem legowo dan varietas (BIMA URI dan NASA 29) di Yogyakarta; teknologi PTT jagung NASA 29 di NTT; teknologi budidaya padi, jagung dan kedelai dengan pendekatan PTT spesifik lokasi di NTB; teknologi budidaya padi spesifik lokasi di Kalimantan Barat; teknologi budidaya padi, jagung dan kedelai di Kalimantan Barat; teknologi VUB padi di Bali; teknologi budidaya padi sawah di Kalimantan Tengah; teknologi budidaya jagung di Kalimantan Selatan; teknologi budidaya padi di Kalimantan Selatan; teknologi budidaya kedelai di Kalimantan Selatan; peta dan rekomendasi varietas dan IP di Kalimantan Selatan; teknologi turunan jago di Kalimantan Timur; model PTT padi dan jagung pada kawasan pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan di Kalimantan Tengah; teknologi PTT padi di Gorontalo; teknologi budidaya padi di Sulawesi Utara; teknologi budidaya padi sawah di Sulawesi Utara; teknologi budidaya jagung di Sulawesi Utara; teknologi budidaya kedelai di Sulawesi Utara; teknologi usahatani jagung di Sulawesi Utara; teknologi pengembangan padi, jagung, dan kedelai di Sulawesi Selatan; teknologi PTT padi, jagung dan kedelai melalui kegiatan denfarm di Sulawesi Tengah; teknologi PTT Jagung sesuai dengan rekomendasi di areal kawasan pertanaman jagung di Sulawesi Tengah; teknologi VUB dan PTT jagung di Sulawesi Tenggara; teknologi PTT kedelai di lahan sawah tadah hujan di Maluku Utara; teknologi pengembangan kawasan padi di Maluku Utara; inovasi teknologi Jajar Legowo di Maluku Utara; teknologi VUB padi di lahan basah di Maluku; teknologi PTT padi spesifik lokasi di Papua; teknologi budidaya kedelai di lahan kering di Papua; teknologi pengembangan kedelai di lahan kering papua; teknologi PTT padi sawah di Papua Barat; teknologi pemanfaatan biochart di Kepulauan Riau; teknologi budidaya tanaman jagung di lahan bekas tambang/bauksit di Kepulauan Riau; teknologi budidaya padi sawah di Kepulauan Riau.

Paket teknologi tanaman hortikultura. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi pembibitan jeruk dan pengendalian hama penyakit di Sumatera Utara; teknologi perbenihan bawang merah dari biji botani (TSS) di Sumatera Utara; teknologi budidaya cabai merah dan perbenihan jeruk di Riau; teknik pemangkasan jeruk dengan pola 1,3,9 di Sumatera Barat; teknologi budidaya jeruk sehat di Sumatera Barat; teknologi PTT hortikultura di Sumatera Selatan; teknologi pengembangan kawasan cabai merah di Bengkulu; teknologi budidaya tanaman okra di Jambi; teknologi budidaya tanaman sayuran dengan VUB di Jambi; teknologi budidaya tanaman lidah buaya di Jambi; teknologi budidaya buah naga di Jambi; teknologi komoditas bawang merah dan cabai merah di Banten; teknologi budidaya jeruk di Banten; teknologi pengolahan sukun di DKI; teknologi pendampingan PTT cabai di Lampung; teknologi pembibitan sayuran di Jawa Barat; teknologi perbanyak benih bawang merah menggunakan biji di Jawa Barat; teknologi budidaya kentang sistem mulsa di Jawa Barat; teknologi budidaya buah dalam pot di Jawa Barat; teknologi

budidaya kentang sistem mulsa di Jawa Barat; teknologi budidaya hidroponik daun di Jawa Barat; teknologi budidaya bawang merah dan cabai merah di Yogyakarta; teknologi perbenihan, budidaya dan pasca panen berbasis ramah lingkungan cabai, bawang merah dan jeruk di Jawa Tengah; teknologi peningkatan produksi dan pendapatan petani hortikultura cabai, bawang merah dan jeruk di Jawa Timur; inovasi teknologi BUJANGSETA pada tanaman jeruk di Bali; teknologi budidaya bawang merah di lahan kering NTT; teknologi budidaya bawang merah di lahan kering di NTT; teknologi budidaya bawang merah dan cabe dengan pendekatan PTT di NTB; teknologi produksi cabai di Gorontalo; teknologi pengendalian OPT cabai berbasis PHT dengan aplikasi my agri di Sulawesi Barat; teknologi komoditas cabai, bawang merah dan jeruk spesifik lokasi di Sulawesi Tengah; teknologi spesifik lokasi pengendalian busuk buah di Sulawesi Tengah; teknologi bawang merah di Sulawesi Tenggara; teknologi pengembangan bawang merah dan cabai di Sulawesi Selatan; teknologi cabai di Sulawesi Selatan; teknologi pada budidaya bawang merah, cabai, dan jeruk di Sulawesi Tengah; teknologi budidaya cabai, bawang merah dan jeruk di Sulawesi Barat; teknologi pada tanaman bawang merah, cabai merah dan jeruk di Sulawesi Utara; teknologi budidaya cabai di Sulawesi Tenggara; teknologi budidaya cabai di Sulawesi Utara; teknologi pengembangan kawasan jeruk di Kalimantan Barat; inovasi teknologi budidaya bawang merah, cabai dan jeruk spesifik lokasi di Kalimantan Barat; teknologi budidaya jeruk siam banjar di Kalimantan Selatan; teknologi budidaya tanaman okra di Kalimantan Selatan; teknologi budidaya cabai merah di Kalimantan Selatan; teknologi pengembangan kawasan hortikultura jeruk di Kalimantan Timur; teknologi budidaya bawang merah Kalimantan Selatan; teknologi vertiminaponik untuk pekarangan sempit di Maluku Utara; teknologi pengembangan kawasan hortikultura di Maluku Utara; teknologi pengendalian OPT cabai dan bawang di Maluku Utara; teknologi perbenihan tanaman jeruk bersertifikat di Papua; teknologi perbenihan tanaman jeruk bersertifikat di Papua; teknologi budidaya jeruk spesifik lokasi di Papua; teknologi budidaya bawang merah organik di Kabupaten Jayawijaya di Papua; teknologi budidaya cabai dan pemupukan spesifik lokasi di Papua Barat; teknologi budidaya cabai di Papua Barat; teknologi budidaya jagung manis di Kepulauan Riau; teknologi budidaya jagung pipil di Kepulauan Riau; dan teknologi budidaya cabai di Kepulauan Riau.

Paket teknologi tanaman perkebunan. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi pengendalian hama kelapa di Sumatera Barat; teknologi pemupukan kelapa di Sumatera Barat; teknologi ratoon pada tebu di Sumatera Utara; teknologi pengendalian hama kumbang pada tanaman kelapa di Riau; teknologi budidaya lada dan pembuatan pupuk di Bangka Belitung; teknologi intensifikasi budidaya *recovery* pada tanaman teh di Jawa Barat; teknologi peningkatan mutu seed angin tanaman karet (pengolahan lateks dengan crom rubber) di Jambi; teknologi dalam intergrasi kambing kakao di Yogyakarta; teknologi tebu terpadu melalui sistem tanam juring ganda dan juring

tunggal di Jawa Tengah; teknologi penanaman tebu dan kopi di Jawa Timur; teknologi PTT tanaman pala hutan di Papua; teknologi pasca panen biji dan fuli pala di Papua; teknologi budidaya tanaman tebu secara intensif di Lampung; teknologi biochart dari kulit buah kakao di Sulawesi Tengah; teknologi infus akar, pengendalian hama dan penyakit tanaman pala di Maluku; teknologi usahatani cengkeh, dan pala di Sulawesi Utara; teknologi pemupukan cengkeh di Maluku; teknologi perkebunan P3S, rorak, pemupukan, pengendalian HPT pada tanaman kopi, kakao dan mete di NTT; teknologi pemangkasan tanaman mete di NTB; teknologi pengolahan gula semut menggunakan nira aren di Bali; teknologi integrasi budidaya kakao-kambing di Sulawesi Barat; teknologi budidaya lada di Sulawesi Barat; teknologi budidaya kakao di Sulawesi Barat; model pendampingan pengendalian penyakit Vascular Streak Dieback (VSD) anjuran pada tanaman kakao di Sulawesi Tengah; teknologi pengembangan kawasan kopi dan tebu di Sulawesi Selatan; teknologi budidaya pala dan cengkeh di Maluku; dan teknologi budidaya pala di Papua Barat.

Paket teknologi peternakan. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi pengembangan kawasan pertanian nasional peternakan di Sumatera Utara; teknologi budidaya ternak ruminansia sapi dan kerbau di Sumatera Barat; teknologi pengawetan pakan di Sumatera Selatan; teknologi kandang komunal ternak sapi di Jambi; teknologi penggemukan menggunakan pakan tambahan berupa tanaman sorgum batang manis di Bali; teknologi pengolahan limbah ternak di Jambi; teknologi perbaikan sistem pemeliharaan sapi induk di Bengkulu; teknologi pengembangan ayam merawang di Bangka Belitung; teknologi manajemen pakan sapi potong di Banten; teknologi Ayam Sensi di Banten; teknologi manajemen pemeliharaan ternak di Jawa Tengah; teknologi pembuatan semen beku dombos di Jawa Tengah; teknologi pakan sapi di Jawa Barat; teknologi sapi potong di Jawa Barat; model tata cara pengorganisasian sistem produksi peternakan sapi pedaging, sapi perah, kambing dan domba spesifik lokasi di Jawa Timur; teknologi perbibitan, pakan dan pascapanen oleh pelaku utama (peternak sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing dan domba) di Jawa Tengah; teknologi inseminasi buatan (IB) di Bali; teknologi pakan ternak di Bali; teknologi penggemukan sapi di Bali; teknologi limbah ternak di Bali; teknologi sistem usahatani ayam KUB di NTB; teknologi penggemukan berbasis legume pohon di NTB; teknologi budidaya ternak sapi potong di Sulawesi Barat; teknologi pengembangan peternakan sapi di Sulawesi Selatan; teknologi perbibitan dan penggemukan sapi potong di Sulawesi Tengah; teknologi pengembangan kawasan peternakan sapi potong dalam satu wilayah melalui media SL di Sulawesi Tengah; teknologi manajemen pakan sapi potong di Sulawesi Tenggara; teknologi budidaya sapi di Sulawesi Utara; pengolahan jerami padi dan jagung untuk pakan di Sulawesi Utara; teknologi pengolahan pakan ternak berbasis limbah perkebunan di Kalimantan Selatan; teknologi pengolahan pakan ternak berbasis limbah perkebunan di Kalimantan Selatan; teknologi pembibitan ayam KUB di Kalimantan Selatan; teknologi pengembangan

ayam kampung unggul berbasis rumah tangga di Kalimantan Selatan; teknologi pengembangan kawasan pertanian nasional kambing di Maluku; teknologi pembibitan sapi semi intensif di Maluku; inovasi teknologi peternakan di Maluku Utara; teknologi pengembangan kawasan peternakan sapi di Maluku Utara; teknologi budidaya sapi potong spesifik lokasi di Papua; teknologi pemanfaatan pakan spesifik lokasi di Papua; dan teknologi pengembangan hijauan pakan ternak unggul di Papua Barat.

Paket teknologi komoditas lainnya. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi peningkatan produktivitas lahan gambut terdegradasi yang ditanami kelapa sawit di Riau; teknologi taman agroinovasi berupa teknologi manajemen pemeliharaan kambing boerka dan ayam KUB dan penataan lahan pekarangan di Bengkulu; teknologi optimalisasi lahan kantor dan lahan percontohan budidaya jagung manis, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, cabai merah, sayuran, tomat, kol, bawang daun, kacang panjang, terong, jahe di Aceh; teknologi tanaman bunga matahari sebagai pengendalian lalat buah di Jambi; teknologi budidaya dan konservasi sumber daya genetik nenas tangkit di Jambi; teknologi konservasi tanah dengan tanaman penguat teras di Jambi; teknologi budidaya vertikultur di Jawa Barat; inovasi teknologi terkait dengan ketahanan pangan di Jawa Tengah; teknologi inovasi pertanian dalam taman agro inovasi di Jawa Timur; teknologi vermikompost di DKI; teknologi *wall gardening* di DKI; teknologi aeroponik di DKI; teknologi pengembangan kawasan pertanian nasional peningkatan komunikasi dan akselerasi inovasi teknologi pertanian di Sulawesi Barat; teknologi pemanfaatan lahan pekarangan di NTB; teknologi KATAM di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jawa Timur; teknologi penataan lahan dan pekarangan kepada pengguna di Kalimantan Selatan; teknologi taman agro inovasi di Maluku; dan teknologi pestisida nabati di Papua; dan teknologi biogas di Papua Barat.

Sistem Usaha Pertanian Inovatif (SUP-I) berbasis pada lahan kering di wilayah perbatasan Kalimantan Barat telah ikut mengungkit pemanfaatan teknologi VUB tanaman pangan. Kegiatan ini menerapkan inovasi teknologi budidaya padi gogo dan jagung secara monokultur dan tumpang sari tanaman (turiman) jagung, padi gogo, jagung, dan kacang tanah. Inovasi teknologi ini merupakan salah satu tujuan optimalisasi lahan sehingga dalam satu waktu petani bisa panen dua atau tiga komoditas sekaligus untuk dapat mensuplai ke wilayah negara tetangga. Menurut Bupati Kabupaten Bengkayang saat temu lapang dan panen, penanaman padi Inpago 9 dapat mengatasi tanam berpindah yang seringkali mengakibatkan hot spots di Kabupaten Bengkayang. Selain Inpago 9, Kelompok Tani Sethia Tani telah berhasil memproduksi benih jagung Bima 19 URI dan kacang tanah varietas Kancil, Talam, dan Tuban (Gambar 3).



Gambar 3. Bersama Bupati Bengkayang, panen jagung Bima 19 URI pada kegiatan SUP-I di wilayah perbatasan Kalimantan Barat

Faktor lain yang mendorong pemanfaatan teknologi adalah kegiatan Bioindustri. Bioindustri adalah program strategis Balitbangtan yang diimplementasikan BPTP di 33 provinsi di Indonesia. Melalui sistem pertanian bioindustri, tidak ada yang terbuang karena *output* satu sub sistem menjadi input bagi sub sistem lain. Limbah pun dapat diminimalisir, serta yang tak kalah penting, produksi dapat ditingkatkan. BPTP Bali adalah salah satu yang sukses menggiatkan bioindustri pada beberapa desa binaan hingga terasa manfaatnya. BPTP Bali telah membina Desa Antapan Kabupaten Tabanan dan Desa Bukti Kabupaten Buleleng sejak tahun 2015. Kegiatan bioindustri yang dikembangkan di Bali mengusung konsep integrasi tanaman dan ternak. Inovasi yang diperkenalkan oleh BPTP Bali ke petani binaan yaitu pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik untuk tingkatan produktivitas sayuran, serta teknologi pakan untuk meningkatkan performa ternak sapi. Penerapan model bioindustri ini terbukti efisien. Inovasi pupuk organik padat dan cair yang diolah oleh masing-masing petani untuk lahannya sendiri, telah menurunkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia sebesar 40%. Pengembangan model bioindustri ini turut berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi petani.

Peternak plasma ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) mendapatkan keuntungan setelah mengikuti kegiatan Unit Inti Plasma Pembibitan Ayam Skala Rumah Tangga yang digelar BPTP Riau. Melalui penerapan ilmu yang didapat dari bimbingan teknis teknologi inovasi pakan ternak dan perbibitan ayam KUB, dengan memelihara DOC yang dipelihara selama 2,5 bulan akan menghasilkan ayam lokal siap potong 1,3 – 1,4 kg per ekor. Harga jual per kg bobot hidup

Rp 34.000 – Rp 35.000. Keuntungan bersih yang diterima per ekor adalah Rp 14.000 – Rp 17.000 per ekor, sedangkan peternak plasma rutin memelihara sekitar 200 – 300 ekor dalam satu periode.



Gambar 4. Budidaya padi Largo Super di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat

Pendampingan teknologi oleh BPTP juga menggiatkan pemanfaatan teknologi spesifik lokasi di masyarakat. Salah satunya adalah pendampingan budidaya padi Largo Super di lahan kering Dharmasraya, Sumatera Barat yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2017. Largo super merupakan paket inovasi teknologi dengan cara tanam larikan legowo 2 : 1, dengan menggunakan varietas unggul padi gogo potensi hasil tinggi, pemupukan anorganik dan organik menggunakan biodekomposer M-Dec dan pupuk hayati Agrimeth, mengaplikasikan penggunaan pupuk anorganik yang berimbang berdasarkan perangkat Uji Tanah Tanah Kering (PUTK), mekanisasi penuh sejak pengolahan tanah, penggunaan alat tanam benih langsung (Atabela), penyiangan gulma, serta panen dengan *combine harvester* (Gambar 4).

Bupati Dharmasraya memberi apresiasi yang tinggi terhadap kerjasama BPTP Sumatera Barat dengan Pemda Dharmasraya yang telah memberi manfaat terhadap kemajuan Dharmasraya, khususnya di bidang pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya pada saat temu lapang budidaya padi Largo Super, tanpa ada kajian dan diseminasi dari BPTP Sumatera Barat, pemerintah daerah tidak akan berani menerapkan suatu teknologi karena dapat salah dalam mengambil keputusan sehingga gagal dan merugikan petani. Salah satu kunci pengembangan padi gogo di antara sawit adalah pemilihan

varietas toleran lahan masam tahan penyakit blas, pemberian bahan amelioran, dan pemupukan yang tepat. Dari tiga varietas yang diuji BPTP Sumbar, Inpago 8 dan 9 mampu menghasilkan 4,8 ton GKP/ha, sementara Inpago 10 puso akibat penyakit blas. Untuk itu, menurut Kepala Bappeda, perbaikan teknologi Largo Super di Sumatera Barat akan tetap dilakukan terutama dalam pengaturan pola tanam dengan komoditas palawija (jagung dan kedelai) sehingga akan melahirkan inovasi yang lebih menguntungkan dalam upaya optimalisasi lahan dalam gawang sawit.

Indikator Kinerja 2:

Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan

Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan merupakan indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian. Indikator kinerja kedua yang ditargetkan pada tahun 2018 telah tercapai 100 persen, termasuk kategori **berhasil** (Tabel 8).

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Paket Teknologi Pertanian yang Dihasilkan Terhadap Pengkajian Teknologi Pertanian yang Dilakukan Pada Tahun Berjalan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	%	100	100	100

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut menjadi paket teknologi pertanian wilayah. Di antara teknologi pertanian spesifik lokasi tersebut ada yang berpotensi untuk menjadi teknologi pertanian unggulan. Sedangkan pengkajian teknologi pertanian adalah kegiatan pengujian kesesuaian komponen teknologi pertanian pada berbagai kondisi lahan dan agroklimat untuk menghasilkan teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi. Target tersebut dicapai melalui 100 kegiatan pengkajian teknologi pertanian tahun 2018, dengan rincian paket teknologi yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:

Paket teknologi tanaman pangan spesifik lokasi. Paket teknologi yang dihasilkan antara lain VUB padi gogo di lahan kering Aceh; varietas jagung dan padi gogo di lahan kering dataran tinggi Sumatera Utara; varietas adaptif (Logawa) di lahan pasang surut Riau; varietas padi toleran fe dan salin di lahan pasang surut (Inpara 9 dan Inpari 35) Kalimantan Tengah; varietas jagung

adaptif di lahan kering dataran rendah Riau; SUP tanaman pangan lahan kering dataran rendah Sumatera Utara; usaha tani padi di lahan tadah hujan Bali; sistem usaha tani padi dan kedelai di lahan rawa pasang surut Kalimantan Barat; budidaya padi di lahan sawah bukaan baru di Jambi; budidaya padi lahan rawa bukaan baru di Bangka Belitung; budidaya padi Largo Super dan jagung di Jawa Barat; teknologi sistem usaha tani padi dan kedelai lahan rawa pasang surut Kalimantan Barat, penanaman tanaman sela (kedelai) diantara tanaman perkebunan (Lontara) di Sulawesi Selatan; usahatani padi sawah berbasis organik di NTB; budidaya jagung dan kedelai di bawah tegakan kelapa pada lahan kering di Maluku Utara; teknologi PTT padi sawah dan pemeliharaan ternak mendukung penerapan sistem pertanian organik di Sumatera Barat; Jarwo Super berbasis VUB padi sawah spesifik (pera) di Sumatera Barat; perbenihan jagung hibrida di Bengkulu; pengendalian WBC di Banten; pengendalian OPT pasang surut dengan PHT Biointensif di Kalimantan Timur; pengendalian hama boleng di Papua; dan pemupukan padi dan jagung di lahan kering beriklim kering di Jawa Timur.

Paket teknologi tanaman hortikultura spesifik lokasi. Paket teknologi yang dihasilkan antara lain varietas bawang merah di dataran rendah (Lokananta, Sanren dan Tuktuk) pada *on* atau *off season* di Riau; varietas bawang merah Bima Brebes dan Trisula di lahan kering Sulawesi Selatan; budidaya bawang merah *off season* ramah lingkungan di Lampung; Proliga bawang merah di lahan dataran rendah Jawa Barat; usahatani bawang merah di lahan gambut Kalimantan Tengah; penanganan, pengemasan dan pengolahan bawang merah di DKI; budidaya cabai merah *off season* ramah lingkungan di Lampung; PHT cabai di luar musim di Sulawesi Barat; pengendalian penyakit layu, penyakit keriting, busuk buah, virus kuning pada cabai di Sulawesi Barat; budidaya cabai rawit dalam pot secara polikultur skala rumah tangga di DKI; pengendalian penyakit cabai rawit dengan penggunaan Trichoderma di Sulawesi Selatan; adaptasi VUB bawang putih di lahan kering di Sulawesi Tenggara; dan pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan buah jeruk siam lahan rawa pasang surut Kalimantan Selatan yang efisien dan menghasilkan nilai tambah di Kalimantan Selatan.

Paket teknologi tanaman perkebunan spesifik lokasi. Paket teknologi yang dihasilkan antara lain perbibitan kopi arabika Gayo I dan II di Aceh, peremajaan kopi melalui sambung pucuk di Aceh; budidaya kopi robusta di Lampung; usahatani dan pengolahan kopi spesifik lokasi di Jambi; rejuvinasi kopi multi klon unggul di Bengkulu; pembuatan pakan tambahan berbasis kulit kopi untuk ternak sapi potong di Bengkulu; PTT tebu di Lampung; pembuatan selai dan saos (*chutney*) daging buah pala sesuai standar SNI di Maluku; pengelolaan hama dan penyakit pascapanen (*storage*) biji pala secara terpadu di Maluku; pemupukan pala di Maluku; budidaya tanaman lada dengan pemberian pupuk secara berimbang di Kepulauan Riau; serta model pertanian bioindustri tanaman kelapa dalam, dan pinang pada lahan sub optimal Jambi.

Paket teknologi peternakan spesifik lokasi. Paket teknologi yang dihasilkan antara lain pembiakan sapi potong dalam pengembangan di lahan kelapa sawit di Sumatera Utara; usahatani sapi dengan pola *mini ranch* di Sumatera Barat; penggemukan Sapi Bali di Bali; perbaikan manajemen reproduksi sapi di Lampung; inovasi pakan tambahan untuk meningkatkan produktivitas sapi pembibitan di Bali; optimalisasi produktivitas Sapi Bali spesifik lokasi melalui teknologi pakan dan reproduksi di Bali; formulasi dan manajemen pemberian pakan serta pengelolaan hasil ikutan ternak sapi (*by product*) di Jawa Barat; teknologi pakan suplemen legume untuk induk dan anak dan alternatif pakan ternak sapi breeding di NTT; pengolahan limbah kotoran ternak menjadi pupuk untuk tanaman sawit dan jagung di Aceh; pengendalian serangan parasit pada Sapi Bali di Bali; perbibitan dan pembesaran itik lokal (Itik Damiaking dan Itik Mojosari) di Banten; pemeliharaan dan peningkatan nilai tambah ternak kelinci di wilayah perkotaan di DKI; dan budidaya babi berbasis sumberdaya lokal di Bali.

Kajian budidaya padi lahan rawa spesifik lokasi di Lampung menghasilkan teknologi budidaya padi lahan rawa spesifik wilayah Lampung. Teknologi ini pada intinya meliputi penerapan budidaya padi lahan rawa sistem ratun, hazton, aplikasi bahan organik dan pupuk hayati (bionano silika) sekaligus upaya pengembangan varietas unggul padi baru di tipologi lahan rawa spesifik wilayah Lampung. Tujuannya mensiasati keterbatasan sumberdaya lahan dan air pada musim gadu, dimana keberadaan air yang terbatas dicoba untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Kendala yang seringkali dihadapi adalah melesetnya perkiraan ketersediaan air dimana tidak memenuhi kebutuhan air hingga panen. Solusinya berusaha berhitung cermat dengan musim kemarau serta mencari sumber air irigasi alternatif.

BPTP Kalimantan Tengah memperkenalkan ayam KUB melalui introduksi teknologi pemeliharaan yang intensif berbasis rumah tangga. Dengan pemeliharaan yang intensif di tingkat rumah tangga berat badan ayam KUB dapat mencapai 1,5 – 2 kg dalam 110 hari. Sebagian besar peternak sangat tertarik untuk melanjutkan memelihara ayam KUB karena pertambahan berat badan sangat cepat dibandingkan dengan ayam kampung lokal. Selain itu sumber pakan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan ayam KUB juga diidentifikasi. Bahan-bahan lokal yang dapat dijadikan bahan pakan tambahan antara lain singkong, daun papaya, limbah rumah tangga (kangkung dan bayam) dan dedak. Dengan adanya paket teknologi ini peternak dapat memelihara ayam kampung unggul dengan jangka waktu pemeliharaan yang tidak lama (hanya sekitar 90 – 100 hari) dengan berat badan yang sama apabila memelihara ayam kampung lokal selama satu tahun.

BPTP Jakarta melakukan Kajian Teknologi Pemeliharaan dan Peningkatan Nilai Tambah Ternak Kelinci di Wilayah Perkotaan, yang menghasilkan paket teknologi pemeliharaan dan peningkatan nilai tambah ternak kelinci di wilayah perkotaan yang menerapkan beberapa komponen teknologi diantaranya adalah teknologi

pakan, teknologi perkandangan, teknologi pembibitan/reproduksi, dan teknologi pasca panen. Teknologi pakan bergizi dengan membuat formula pakan berbentuk pellet sehingga pakan dapat disimpan lama dengan kualitas yang tetap terjaga. Teknologi perkandangan menggunakan sistim kandang battery dilengkapi tempat pakan dan *nipple* air minum serta tray penampung feses dan talang urin. Teknologi pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan. Teknologi pasca panen memberikan peningkatan nilai tambah melalui olahan daging kelinci.

Optimalisasi produktivitas sapi Bali spesifik lokasi dilakukan melalui teknologi pakan dan reproduksi. Penggunaan teknologi *flushing* pada sapi di kawasan pembibitan sapi di Kecamatan Nusa Penida memberikan hasil yang lebih baik terhadap produktivitas sapi meliputi bobot lahir, performa sapi, harga jual serta interval *calving* yang diperpendek. Penggunaan hormon dalam usaha penanganan gangguan reproduksi (berahi) pada induk sapi *post partus* > 80% mampu menginduksi berahi dan > 46% kebuntingan pada induk.

BB Pengkajian melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Sistem Usaha Pertanian (SUP) Inovatif di Lahan Sub-Optimal. Pada tahun 2018, kegiatan meliputi penambahan perluasan areal jaringan irigasi pada lahan seluas 11 ha (sebelah utara areal SUP 2017), sehingga total layanan irigasi mencapai 17 ha, pengadaan bak/drum penampung air kapasitas 1000 liter sebanyak 20 buah, instalasi jaringan irigasi pada luasan 11 ha, dan fasilitasi saprodi (benih, pupuk, mulsa, dan pestisida) untuk display teknologi budidaya dalam bentuk demfarm. Introduksi teknologi pengelolaan air dan budidaya tanaman sayuran dilakukan pada musim kemarau (*off season*) untuk meningkatkan IP, dan pendapatan petani pada musim kering. Model SUP Inovatif sangat potensial untuk dikembangkan pada kawasan lahan kering, khususnya di Provinsi Banten. Hal yang sangat krusial dalam pengembangan agribisnis pada lahan kering adalah tersedianya sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau, sehingga budidaya tanaman tidak hanya menunggu musim hujan, sehingga nantinya akan meningkatkan Indeks Pertanaman. Pemilihan komoditas perlu disesuaikan dengan permintaan pasar termasuk komoditas sayuran dataran rendah. Pembinaan kelembagaan petani dan pendukung sangat diperlukan untuk pengembangan SUP Inovatif lahan kering yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah daerah merupakan faktor kunci untuk keberlanjutan pengembangan SUP Inovatif lahan kering di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang.

Karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2018, maka perbandingan rasio tidak dapat dilakukan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian teknologi pertanian spesifik lokasi yang tersedia pada tahun sebelumnya (132 teknologi), capaian paket teknologi yang dihasilkan tahun ini mengalami penurunan.

Indikator Kinerja 3

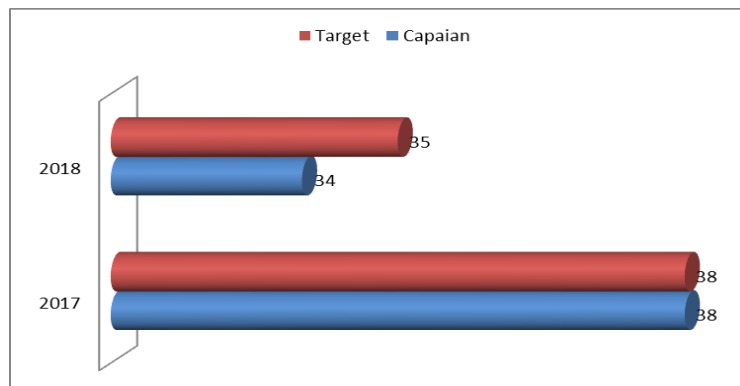
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan

Indikator kinerja ketiga dari sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian adalah jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Nilai capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Rekomendasi	34	35	102,9

Capaian target jumlah rekomendasi kebijakan sebesar 35 rekomendasi (102,9%) dari target 34 rekomendasi (**sangat berhasil**). Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang dihasilkan dari kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan BB Pengkajian dan BPTP. Adapun jenis rekomendasi kebijakan di lingkup BB Pengkajian adalah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian responsif dan antisipatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini mengalami penurunan sebanyak tiga rekomendasi (7,8%). Hal ini terjadi disebabkan tahun ini terjadi penurunan target indikator kinerja sebanyak empat rekomendasi dari 38 menjadi 34 rekomendasi (Gambar 5).



Gambar 5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Rekomendasi kebijakan yang telah tercapai pada tahun 2018 antara lain: rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian perkotaan di Jakarta;

rekomendasi kebijakan program pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah; rekomendasi kebijakan pengembangan pertanian berbasis pangan lokal komoditas ubi jalar dan gembili di Merauke; rekomendasi kebijakan mekanisme penyimpanan jagung yang baik menunjang pengembangan pangan di NTT; rekomendasi kebijakan dampak pengembangan jagung hibrida melalui program UPSUS di Sulawesi Tenggara; rekomendasi kebijakan strategi pengembangan keladi ungu di Rokan Hilir; rekomendasi kebijakan efektifitas penggunaan alsintan berbantuan dan kelembagaan UPJ dalam peningkatan produksi padi di Banten; rekomendasi kebijakan pengaruh kualitas beras/gabah terhadap harga beras/gabah mendukung kebijakan serap gabah/beras di NTB; rekomendasi kebijakan Peremajaan karet, dan kelapa sawit rakyat di Jambi; rekomendasi kebijakan pengembangan ayam KUB di Jawa Barat; rumusan alternatif solusi untuk pemecahan masalah dalam implementasi UPSUS SIWAB untuk peningkatan produktivitas ternak di Bengkulu.

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan di BPTP NTB menghasilkan beberapa rumusan yaitu (1) Serap gabah/beras memiliki korelasi/hubungan yang erat dengan harga beras, harga GKG, Berat GKG, berat beras, kadar air beras, persen beras utuh, biaya pengolahan gabah menjadi beras termasuk di dalamnya biaya transportasi, (2) Harga/nilai gabah GKG memiliki korelasi/hubungan erat dengan rendemen GKG ke beras, semakin tinggi rendemen GKG ke beras semakin tinggi harga/nilai gabah GKG, dan (3) Harga/nilai beras memiliki korelasi/hubungan erat dengan berat beras, semakin berat beras semakin tinggi harga/nilai beras.

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan di BPTP Banten menghasilkan analisis: (1) Adanya alsintan berbantuan traktor tangan dapat menambah luas tanam dan menurunkan biaya pengolahan tanah, (2) *Combine harvester* dapat mempercepat masa panen, dan (3) Kelembagaan UPJA belum berkembang secara optimal. Isi rekomendasinya adalah perlu pelatihan (penggunaan dan perbaikan mesin alsintan) dan pembinaan kelompok yang berkesinambungan.

Rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan di BPTP Jawa Barat adalah pengembangan ayam KUB dalam program BEKERJA merupakan program bantuan langsung non tunai dari pemerintah yang dinilai tepat oleh masyarakat dan stakeholder di daerah. Dari rekomendasi tersebut, langkah tindak lanjut yang ditetapkan sebagai berikut: (1) Segera membangun kelembagaan di tingkat produksi (kelompok peternak dan kios-kios sapronak) dan pemasaran (koperasi, BUMDES, kelompok peternak), (2) Fasilitasi pasar dengan menyeimbangkan sebaran margin pemasaran diantara pelaku usaha sesuai kontribusi dan biaya, (3) Memperpendek rantai distribusi, (4) Pembangunan pabrik pakan mini sebagai sarana pendukung produksi, (5) Meningkatkan kualitas sumberdaya peternak melalui pendampingan dan pembinaan, (6) Saling bekerjasama antara sektor peternakan dengan sektor lain yang terkait, (7) Kemitraan swasta-pemerintah-perguruan tinggi-masyarakat, (8) Menciptakan kawasan khusus/tata ruang, dan (9) Kredit lunak dari perbankan (penyederhanaan proses peminjaman).

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sasaran meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Indikator Kinerja 4:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Tabel 10).

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN RB No 14 tahun 2017, nilai IKM rata-rata BB Pengkajian pada tahun 2018 sebesar 85,8, berada pada nilai interval 3,0644 – 3,532 atau nilai persepsi 3. Artinya mutu pelayanan kinerja berada pada kategori B atau kinerja unit pelayanan BB Pengkajian dinilai **baik**. Mengacu pada target indikator kinerja, IKM atas layanan publik BB Pengkajian telah mencapai target, karena telah tercapai nilai persepsi sebesar 3 (100%), sehingga termasuk dalam kategori **berhasil**. Ruang lingkup pengukuran kepuasan masyarakat ini meliputi sembilan unsur yakni persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Responden yang disurvei berjumlah 468 orang yang berasal dari PNS, swasta, dan wiraswasta, pelajar, mahasiswa, dan lainnya.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.	Nilai IKM	3	3	100

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2018. Namun demikian, BB Pengkajian telah melakukan pengukuran IKM pada tahun 2017 walaupun dengan

kriteria pengukuran yang berbeda yaitu dengan mengukur 14 unsur pelayanan. Pada tahun 2017, hasil survei kepuasan BB Pengkajian mendapatkan nilai rata-rata 80,5 (mutu pelayanan **baik**).

Sasaran 3

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian memiliki indikator kinerja jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Indikator Kinerja 4:

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Implementasi SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Temuan	5	-	0

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP diperoleh dari evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal atas lima aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB no 12 Tahun 2015 yang meliputi Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Capaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Namun pada tahun 2018, BB Pengkajian tidak menjadi sampling dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, sehingga capaian indikator ini tidak dapat diukur. Indikator kinerja ini pun tidak

dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2018.

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja BB Pengkajian dengan Target Renstra 2015 - 2019

Jika membandingkan dengan target tahun 2018 yang terdapat pada Renstra Revisi tahun 2015 – 2019, secara umum capaian kinerja BB Pengkajian tahun 2018 mencapai target (Tabel 12). Indikator yang mencapai target sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan capaian 100% yaitu (1) Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (100%). Sedangkan indikator yang nilai capaiannya melebihi target Renstra Revisi yaitu indikator: (1) Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dengan capaian sebesar 289,1%, yang disebabkan karena capaian tahun 2018 dihitung berdasarkan nilai kumulatif lima tahun terakhir, mempunyai nilai yang tinggi pada tahun 2014 – 2017, dan (2) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan (102,9%).

Dengan adanya penyempurnaan IKU, Renstra BB Pengkajian direvisi pada tahun 2018, sehingga untuk perbandingan nilai capaian selama tahun 2015 – 2018 dengan target Renstra Revisi tahun 2015 – 2019, hanya dapat dilakukan pada dua tahun terakhir. Untuk indikator Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) capaiannya sudah melampaui target Renstra Revisi yaitu sebesar 155,1%. Sedangkan indikator Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 karena target tersebut sudah ada pada Renstra awal. Berdasarkan hasil capaiannya, kinerja indikator ini sebesar 92,94% dari total target Renstra.

Khusus untuk indikator Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tidak dapat diukur karena pada tahun 2018, BB Pengkajian tidak menjadi sampling dalam evaluasi atas implementasi SAKIP.

Tabel 12. Capaian Kinerja BB Pengkajian dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Jumlah Target 2015-2019	Capaian Tahun				Realisasi Tahun 2018 dibandingkan Target 2018 (%)	Realisasi Tahun 2015-2018 dibandingkan Target Tahun 2015-2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		
1	Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	-	-	-	431	372	803	-	-	-	1.246	289,1	155,1
2	Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100
3	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	34	34	34	34	34	170	45	40	38	35	102,9	92,94
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BB Pengkajian	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	100	100
5	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup BB Pengkajian	-	-	-	5	5	10	-	-	-	-	0	0

3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BB Pengkajian dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2018 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2) intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan di masing-masing BPTP dan BB Pengkajian untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3) input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, (4) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (peneliti, penyuluh, litkayasa, dan tenaga administrasi) dan (5) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Beberapa capaian melebihi target yang telah ditetapkan karena didukung dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh BB Pengkajian pada tahun 2018 yaitu kegiatan seperti Pendampingan UPSUS, Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi, Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor Wilayah Perbatasan, Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Sistem Usaha Pertanian Inovatif, dan kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh BPTP.

Pendampingan UPSUS yang dilakukan BPTP untuk pencapaian swasembada pangan telah ikut mengungkit terdiseminasiannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi. Selain melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemda provinsi dan kabupaten untuk mencapai target LTT di 10 kabupaten, BPTP juga melakukan pendampingan teknologi (varietas, perbenihan). Faktor lain pengungkit terdiseminasinya teknologi adalah kegiatan Dukungan Inovasi Teknologi Pertanian Daerah Perbatasan. Dukungan inovasi pertanian ini dilakukan melalui fasilitasi penerapan inovasi pertanian, percepatan diseminasi dan adopsi inovasi pertanian, dan pendampingan inovasi pertanian. Dukungan inovasi pertanian yang dilakukan di 13 provinsi perbatasan inilah yang dapat mengungkit terdiseminasinya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi.

Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) sebagian kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon petani koperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan dan (2) beberapa kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor dan sarana prasarana lainnya terkendala oleh keterbatasan waktu pelaksanaan akibat adanya kendala dalam proses pengadaan dan adanya kurangnya komitmen sebagian dari pihak ketiga pelaksana kegiatan pembangunan gedung dan sarana

prasarana lainnya sehingga tidak dapat maksimal menuntaskan pelaksanaan kegiatannya. Seluruh satker sudah menindaklanjuti hal dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja BPTP dalam melaksanakan kegiatannya yaitu: (1) kendala administrasi merupakan hal yang berpengaruh dalam merealisasikan kegiatan, terutama kurangnya tenaga, dan kurang optimalnya para pengelola keuangan dalam memfasilitasi kegiatan pengkajian dan diseminasi, dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah: (1) Melakukan padu padan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP agar terjadi transfer pengetahuan dari tenaga peneliti Balit ke peneliti yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai, dan (2) Perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah dihasilkan Balit komoditas secara berkala untuk mendapatkan inovasi baru dan merakit teknologi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan.

3.1.3. Capaian Kinerja BB Pengkajian Lainnya

BB Pengkajian memiliki berbagai kinerja dan prestasi lainnya yang mendukung pencapaian visi BB Pengkajian. Balitbangtan melalui para inventor di BPTP Bangka Belitung (Dr. Rubiyo, MSi dan tim) pada tanggal 10 Juli 2018 mendapatkan hak atas Paten Sederhana untuk Invensi dengan judul Formula Minuman Penyegar Kopi Lada. Sertifikat Paten Sederhana dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pada acara hilirisasi produk unggulan benih jeruk bebas penyakit yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Pelalawan, Kemenristekdikti, dan Balitjestro, Bupati Pelalawan Riau menyerahkan piagam penghargaan kepada BPTP Riau dan Pemulia BPTP Riau yaitu Dr. Parlin H Sinaga, SP, MP yang telah menghasilkan lima VUB Padi Pasang Surut asal Pelalawan (Lampiran 6). Kerjasama Pemda Pelalawan dengan Kementerian Pertanian melalui BPTP Riau sudah dimulai sejak 2007 khususnya dalam perakitan dan pelepasan varietas unggul baru padi pasang surut yang hingga kini telah melahirkan lima varietas yaitu Cekau, Karya, Mendol, Bono dan Inpara.

BPTP Banten mendapatkan anugerah BMN Award Tahun 2018 pada kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dengan sub Kategori Penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN pada bulan Mei 2018 (Gambar 6). Kegiatan Penganugerahan BMN Awards Tahun 2018 bagi satuan kerja di lingkungan KPKNL Serang diadakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Serang. BMN Awards merupakan kegiatan tahunan DJKN yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang dianggap memiliki tata kelola barang milik negara yang baik.



Gambar 6. Penganugerahan Barang Milik Negara Awards Bagi Satuan Kerja di Lingkungan KPKNL Serang

Pada tahun 2018, BB Pengkajian beserta delapan BPTP memperoleh sertifikat sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementan tahun 2018 sesuai keputusan Menteri Pertanian No. 841/kpts/PW.410/12/2018 (Gambar 7). BPTP yang mendapatkan predikat WBK adalah BPTP Sulawesi Tenggara, BPTP Bali, BPTP Maluku Utara, BPTP Yogyakarta, BPTP Lampung, BPTP Jawa Barat, BPTP Gorontalo, dan BPTP Kalimantan Barat. Piagam penghargaan dapat dilihat pada Lampiran 7.



Gambar 7. Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian mendapatkan Predikat WBK pada Forum Nasional SPIP tahun 2018

Berdasarkan kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti Nomor: 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018, jurnal ilmiah BB Pengkajian yang bernama Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Sertifikat dapat dilihat pada Lampiran 8.

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian kinerja keuangan BB Pengkajian berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Hasil efisiensi dan nilai efisiensi dapat diukur dari perhitungan anggaran, realisasi, dan volume terhadap kelima indikator kinerja tahun berjalan, yaitu (1) Indikator Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan (2) Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan, (3) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, (4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik pengkajian, (4) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi : perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup BB Pengkajian. Pagu anggaran untuk memfasilitasi indikator kinerja BB Pengkajian tersebut sebesar Rp 428,23 milyar dengan realisasi sebesar Rp 402,45 milyar atau sebesar 94,0%. Secara umum capaian keuangan masing-masing indikator kinerja melebihi 90%, dengan kisaran capaian antara 92,1% sampai 98,7%. Kinerja capaian fisik Indikator Kinerja BB Pengkajian telah melampaui target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 118,4% yang dapat digolongkan dalam kategori sangat berhasil. Adapun capaian fisik masing – masing IKU berkisar antara 100% - 289,1%. Bila dibandingkan antara sumber dana yang dialokasikan dengan hasil (*output*) kinerja yang dicapai, maka BB Pengkajian dapat dikategorikan berhasil dalam menjalankan efisiensi dalam mencapai kinerjanya. Hal ini didasari dari pengertian mengenai efisiensi, yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Atau dengan kata lain, efisiensi dapat diterjemahkan sebagai perbandingan *output* terhadap input. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi, BB Pengkajian telah melakukan efisiensi 20% atau nilai efisiensi sebesar 100%. Secara rinci nilai efisiensi indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Balai Besar Pengkajian 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Target	Output		Harga Satuan	Harga Total Seharusnya
		Pagu	Realisasi	(%)		Realisasi	(%)		
1	Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	405.938.815.000	381.367.845.763	93,9	431	1.246	289,1	941.853.399	1.173.549.335.244
2	Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	18.197.868.000	17.192.051.602	94,5	100	100	100,0	181.978.680	18.197.868.000
3	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	2.245.824.000	2.068.130.768	92,1	34	35	102,9	66.053.647	2.311.877.647
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BB Pengkajian	500.000.000	487.716.600	97,5	3	3	100,0	166.666.667	500.000.000
5	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup BB Pengkajian	1.350.001.000	1.332.054.964	98,7	5	-	0,0	270.000.200	-
Jumlah		428.232.508.000	402.447.799.697	94,0			118,4		1.194.559.080.891
Efisiensi (%)									66,31 ⇌20
Nilai Efisiensi (%)									215,78 ⇌100

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2018, pagu total anggaran lingkup BB Pengkajian sebesar Rp 728.462.417.000,-. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BB Pengkajian telah lima kali melakukan revisi DIPA lingkup BB Pengkajian.

Akibat adanya penambahan dan penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran lingkup BB pengkajian sesuai dengan revisi terakhir menjadi Rp. 824.460.053.000,-. Realisasi anggaran lingkup BB Pengkajian hingga 31 Desember 2018 berdasarkan data PMK 249/2011 sebesar Rp. 723.285.355.823,- (87,7%) sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp 101.174.697.177,- (12,27%). Secara rinci realisasi per *output* dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan Lingkup BB Pengkajian Tahun 2018

Kode	<i>Output</i> Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1801	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	824.460.053.000	723.285.355.823	87,7
201	Teknologi Spesifik Lokasi	18.197.868.000	17.689.104.532	97,2
202	Teknologi Yang Terdiseminasi ke Pengguna	60.563.809.000	57.546.096.891	95,0
203	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	2.245.824.000	2.151.857.168	95,8
204	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	6.016.145.000	5.870.322.210	97,6
205	Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan terintegrasi Desa Mandiri Benih	2.653.670.000	2.580.174.667	97,2
206	Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai	6.349.590.000	6.056.794.415	95,4
207	Taman Sains Pertanian (TSP)	7.944.173.000	7.749.040.394	97,5
208	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	19.448.250.000	19.168.950.127	98,6
209	SDG Yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	12.803.403.000	12.463.541.536	97,3
210	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	15.161.734.000	14.559.991.378	96,0
211	Dukungan inovasi teknologi untuk peningkatan IP kawasan pertanian	147.817.290.000	141.088.530.552	95,4
212	Transfer Inovasi Teknologi	283.870.194.000	268.909.497.330	94,7

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
213	Inovasi Perbenihan dan Perbibitan	5.554.395.000	5.283.777.154	95,1
216	Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis	189.237.968.000	117.372.671.991	62,0
217	Inovasi Perbenihan Perbibitan komoditas unggulan (Non Strategis)	445.710.000	442.456.184	99,3
301	Produksi Benih Bawang	5.333.305.000	5.185.007.812	97,2
302	Produksi Benih Kentang	4.776.224.000	4.692.667.679	98,3
303	Produksi Benih Sayuran Lainnya	17.741.049.000	16.861.452.914	95,0
304	Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	2.051.240.000	1.983.912.519	96,7
307	Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan	7.304.975.000	7.041.049.909	96,4
951	Layanan Internal (Overhead)	5.093.237.000	5.087.204.957	99,9
994	Layanan Perkantoran	3.850.000.000	3.501.253.504	90,9

Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 15, sedangkan realisasi per belanja lingkup BPTP dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BB Pengkajian Tahun 2018

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pegawai	225.164.288.000	212.712.743.220	94,5
2	Barang Operasional	58.705.906.000	56.196.754.110	95,7
3	Barang Non Operasional	416.126.894.000	337.608.293.259	81,1
4	Modal	124.462.965.000	116.767.505.234	93,8
Total		824.460.053.000	723.285.295.823	87,7

Realisasi anggaran lingkup BB Pengkajian sebesar 87,7% terdiri dari belanja pegawai sebesar 94,5%, belanja barang operasional sebesar Rp 95,7%, belanja barang non operasional sebesar 81,1%, dan belanja modal sebesar 93,8%. Realisasi belanja barang non operasional rendah karena rendahnya serapan di BPTP Lampung, Jawa Barat, dan NTB yang mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan "BEKERJA" akibat keterbatasan waktu dalam pengadaan DOC, Pakan, dan Vitamin, Obat dan Vaksin (VOV) dan masalah teknis pelaksanaan di lapang sehingga tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti pada Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi kegiatan BEKERJA 2018

NO	URAIAN	SATUAN	TOTAL	
			Target	Realisasi
Jawa Barat				
A	Penerima Manfaat	RTM	11.381	10.622
B	Komoditi: Ayam	Ekor	569.050	531.100
NTB				
A	Penerima Manfaat	RTM	12.208	12.208
B	Komoditi: Ayam	Ekor	658.650	610.400
LAMPUNG				
A	Penerima Manfaat	RTM	8.173	6.583
B	Komoditi: 1. Ayam	Ekor	443.300	284.900
	2. Itik	Ekor	50.000	44.250

Tabel 17. Realisasi Anggaran per BPTP Tahun 2018

No	Satker (BPTP/BB Pengkajian)	Belanja Pegawai			Barang Operasional			Barang Non Operasional			Belanja Modal			Total		
		Pagu (Rp.juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	ealisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%
1	KEPRI	1.624	1.613	99,3	819	796	97,2	3.326	2.770	83,3	500	495	98,9	6.269	5.674	90,5
2	BANTEN	4.816	4.686	97,3	1.566	1.425	91,0	4.653	4.513	97,0	3.509	3.115	88,8	14.543	13.739	94,5
3	BABEL	2.300	2.279	99,1	1.535	1.535	100,0	4.526	4.528	100,0	4.813	3.444	71,5	13.175	11.785	89,5
4	GORONTALO	3.041	2.894	95,2	898	848	94,5	5.015	4.960	98,9	6.295	6.210	98,7	15.249	14.912	97,8
5	MALUT	2.313	2.271	98,2	1.148	1.146	99,9	4.193	3.947	94,1	4.765	4.281	89,9	12.418	11.645	93,8
6	PAPUA BRT	2.332	2.284	98,0	1.438	1.421	98,8	4.658	4.600	98,7	543	537	99,0	8.971	8.842	98,6
7	SULBAR	2.152	1.724	80,1	995	990	99,5	6.809	6.756	99,2	5.277	5.197	98,5	15.233	14.667	96,3
8	JAWA BARAT	8.461	7.970	94,2	2.050	1.970	96,1	73.008	47.797	65,5	2.534	2.461	97,1	86.054	60.198	70,0
9	JATENG	15.217	14.517	95,4	3.341	3.160	94,6	12.091	11.768	97,3	2.526	2.423	96,0	33.174	31.868	96,1
10	JATIM	12.782	11.646	91,1	2.029	1.903	93,7	13.849	12.795	92,4	3.511	3.289	93,7	32.171	29.633	92,1
11	ACEH	6.725	6.579	97,8	1.357	1.324	97,6	5.745	5.708	99,4	1.192	1.185	99,4	15.019	14.797	98,5
12	SUMUT	7.826	7.642	97,6	1.734	1.590	91,7	7.263	6.963	95,9	8.002	7.974	99,7	24.825	24.169	97,4
13	SUMBAR	11.516	10.925	94,9	2.489	2.459	98,8	7.265	7.260	99,9	5.534	4.860	87,8	26.804	25.503	95,1
14	RIAU	5.269	4.941	93,8	1.372	1.322	96,4	5.483	5.127	93,5	2.368	2.015	85,1	14.492	13.406	92,5
15	SUMSEL	5.962	5.491	92,1	1.362	1.342	98,6	7.774	7.324	94,2	4.564	4.388	96,1	19.661	18.545	94,3
16	LAMPUNG	6.924	6.679	96,5	1.948	1.881	96,5	57.623	44.976	78,1	1.918	1.800	93,8	68.413	55.336	80,9
17	KALBAR	5.923	5.712	96,4	1.489	1.391	93,4	5.562	5.442	97,8	2.452	2.424	98,9	15.426	14.969	97,0

No	Satker (BPTP/BB Pengkajian)	Belanja Pegawai			Barang Operasional			Barang Non Operasional			Belanja Modal			Total		
		Pagu (Rp.juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	ealisasi (Rp juta)	%	Pagu (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%
18	KALTENG	4.500	3.781	84,0	1.617	1.581	97,8	4.682	4.554	97,3	579	554	95,6	11.378	10.469	92,0
19	KALTIM	4.515	4.290	95,0	1.158	1.025	88,6	6.166	6.002	97,3	893	875	98,1	12.732	12.193	95,8
20	SULTENG	5.488	5.258	95,8	1.765	1.559	88,4	6.069	5.872	96,8	3.750	3.107	82,9	17.071	15.796	92,5
21	SULTRA	7.076	6.492	91,8	1.780	1.745	98,1	6.037	6.016	99,6	2.513	2.468	98,2	17.406	16.722	96,1
22	MALUKU	5.031	4.849	96,4	1.535	1.497	97,5	4.492	4.456	99,2	4.267	4.251	99,6	15.325	15.054	98,2
23	NTT	10.753	10.005	93,0	2.076	1.960	94,4	7.783	7.288	93,6	5.224	4.966	95,1	25.835	24.219	93,7
24	PAPUA	4.743	4.739	99,9	1.510	1.497	99,2	6.179	6.169	99,9	5.339	5.304	99,3	17.771	17.709	99,7
25	DKI JAKARTA	3.645	3.641	99,9	1.143	1.143	100,0	2.724	2.718	99,8	2.651	2.643	99,7	10.162	10.145	99,8
26	YOGYAKARTA	9.563	8.620	90,1	1.760	1.681	95,5	8.776	7.777	88,6	4.878	4.751	97,4	24.976	22.829	91,4
27	BALI	6.752	6.725	99,6	1.046	1.030	98,5	5.518	5.486	99,4	2.844	2.719	95,6	16.158	15.959	98,8
28	BENGKULU	5.589	5.551	99,3	1.581	1.506	95,2	3.831	3.704	96,7	5.803	5.686	98,0	16.804	16.448	97,9
29	JAMBI	6.674	6.526	97,8	2.305	2.209	95,8	6.755	6.669	98,7	6.266	6.222	99,3	22.000	21.626	98,3
30	KALSEL	7.112	6.244	87,8	1.642	1.512	92,1	6.276	6.119	97,5	2.685	2.563	95,5	17.714	16.438	92,8
31	SULUT	7.887	7.172	90,9	1.178	1.151	97,7	4.788	4.591	95,9	736	736	100,0	14.589	13.650	93,6
32	SULSEL	14.606	13.301	91,1	3.310	3.277	99,0	12.066	11.708	97,0	5.311	4.973	93,6	35.293	33.258	94,2
33	NTB	7.655	7.389	96,5	1.387	1.378	99,3	76.735	43.577	56,8	6.087	4.720	77,5	91.864	57.063	62,1
34	BBP2TP	8.394	8.277	98,6	4.347	3.946	90,8	18.408	17.670	96,0	4.336	4.129	95,2	35.486	34.022	95,9
	TOTAL	225.164	212.713	94,5	58.706	56.197	95,7	416.127	337.608	81,1	124.463	116.768	93,8	824.460	723.285	87,7

3.2.2. Pengelolaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BB Pengkajian TA. 2018 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari sewa mess, sedangkan penerimaan umum diperoleh dari sewa lahan ATM dan sewa ruang kantin. Adapun tarif sewa mess ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP. Kebijakan PNBP TA. 2018 di BB Pengkajian dalam mengelola sumber-sumber PNBP yang ada yaitu dengan memanfaatkan pengelolaan mess sebagai salah satu sumber PNBP secara optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana yang bersumber dari PNBP, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNBP dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBP rata-rata Satuan Kerja diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di lingkup BB Pengkajian. Untuk satker BB Pengkajian PNBP sebesar 100%, sedangkan untuk lingkup BB Pengkajian sebesar 89%. Secara rinci besarnya PNBP lingkup BB Pengkajian tahun 2018 berdasarkan OM SPAN dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Realisasi PNPB lingkup BB Pengkajian Tahun 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	BALI	47.403.000	47.403.000	100
2	JAKARTA	3.524.000	3.524.000	100
3	KALSEL	84.585.000	84.585.000	100
4	PAPUA	32.556.000	32.556.000	100
5	SUMSEL	155.690.000	155.690.000	100
6	BABEL	106.613.000	106.600.000	100
7	KALTENG	101.524.000	101.480.000	100
8	BENGKULU	31.943.000	31.924.900	100
9	BB PENGKAJIAN	22.027.000	22.000.000	100
10	SUMBAR	414.554.000	413.907.545	100
11	GTLO	61.016.000	60.814.000	100
12	MALUKU	97.942.000	97.565.000	100
13	SULTENG	124.996.000	124.356.500	99
14	JAMBI	112.406.000	111.483.000	99
15	BANTEN	106.172.000	105.097.000	99
16	LAMPUNG	73.131.000	72.305.000	99
17	NTB	290.002.000	285.593.587	98
18	SULUT	117.362.000	115.562.000	98
19	KALBAR	88.110.000	86.686.000	98
20	PABAR	19.384.000	19.000.000	98
21	JATENG	275.667.000	269.518.700	98
22	SULBAR	101.718.000	98.215.000	97
23	ACEH	215.318.000	207.810.000	97
24	SULTRA	57.271.000	55.200.000	96
25	SULSEL	427.216.000	406.991.700	95

No	Satker	Pagu	Realisasi	%
26	YOGYA	244.359.000	227.332.743	93
27	KALTIM	106.921.000	97.013.000	91
28	JATIM	453.852.000	402.342.768	89
29	JABAR	350.501.000	306.336.413	87
30	MALUT	26.388.000	16.998.000	64
31	NTT	245.298.000	120.000.000	49
32	SUMUT	361.251.000	160.706.400	44
33	KEPRI	22.379.000	-	0
34	RIAU	18.300.000	-	0
	TOTAL	4.997.379.000	4.446.597.256	89

3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Hibah Luar negeri berdasarkan data OMSPAN tahun 2018 dialokasikan di delapan satker yakni BPTP Aceh, NTB, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTT, dan Yogyakarta dengan total pagu sebesar Rp 2.643.476.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.407.785.000,- (53%) dari BPTP Aceh, NTT, NTB, Kalimantan Timur, dan Riau, sedangkan BPTP Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta dalam proses pelaporan dan verifikasi di KPPN Pusat. Data rinci terdapat pada tabel 19.

Tabel 19. Hibah Langsung Luar negeri lingkup BB Pengkajian 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	ACEH	500.000.000	500.000.000	100
2	NTT	417.000.000	417.000.000	100
3	NTB	348.846.000	348.755.000	100
4	KALTIM	88.470.000	88.470.000	100
5	RIAU	53.560.000	53.560.000	100
6	JATIM	551.016.000	0	0
7	SUMSEL	167.874.000	0	0
8	YOGYAKARTA	516.710.000	0	0
	TOTAL	2.643.476.000	1.407.785.000	53

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan penelitian dan pengkajian BB Pengkajian dan sasaran kumulatif tahun 2018 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

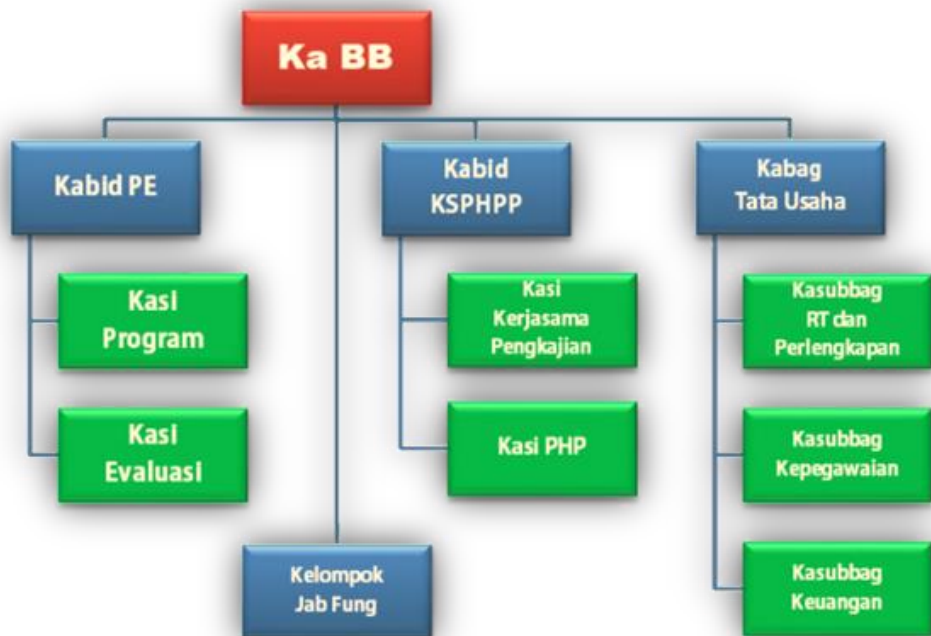
1. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2018 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 118,4 % dengan kategori sangat berhasil.
2. Indikator kinerja yang dapat mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen (berhasil) adalah rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan IKM atas layanan publik BB Pengkajian.
3. Indikator kinerja yang memperoleh capaian dengan nilai > 100 persen (Sangat Berhasil) adalah jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
4. Namun demikian masih ada capaian indikator kinerja yang tidak terukur yaitu jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang karena BB Pengkajian tidak dijadikan sampling penilaian oleh APIP.
5. Secara umum nilai capaian kinerja selama pelaksanaan Renstra tahun 2015 – 2019 menunjukkan hasil di atas 100% untuk indikator kinerja jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) (155,1%). Sedangkan untuk indikator yang mencapai 100% yaitu rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan IKM atas layanan publik BB Pengkajian. Untuk indikator Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan realisasinya mencapai 92,94%
6. Nilai capaian tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2018 yang terdapat pada Renstra Revisi tahun 2015 – 2019, secara umum menunjukkan hasil melebihi target yang telah ditetapkan yaitu jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Indikator kinerja rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mencapai hasil sesuai target (100%).
7. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi, BB Pengkajian telah melakukan efisiensi 20% atau nilai efisiensi sebesar 100%.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah:

1. Melakukan padu padan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP agar terjadi transfer pengetahuan dari tenaga peneliti Balit ke peneliti yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.
2. Perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah dihasilkan Balit Komoditas secara berkala untuk mendapatkan inovasi baru dan merakit teknologi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah serta berwawasan lingkungan.

Lampiran 1. Struktur Organisasi BB Pengkajian berdasarkan Permentan No. 39/Permentan/OT.140/3/201



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja per Tanggal 5 Januari 2018

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN Jalan Tentara Pelajar No.10, Bogor 16114 Telepon (0251) 8351277; Faksimili (0251) 8350928 WEBSITE: www.bbp2tp.litbang.pertanian.go.id ; E-MAIL: bbp2tp@yahoo.com, bbp2tp@litbang.pertanian.go.id</p>	
---	--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haris Syahbuddin
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syakir
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor, 5 Januari 2018

<p>Pihak Kedua</p> <div style="text-align: center;"> Muhammad Syakir</div>	<p>Pihak Pertama</p> <div style="text-align: center;"> Haris Syahbuddin</div>
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian	1. Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	431 Paket Teknologi
		2. Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	34 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian	3 Nilai IKM
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	5 Temuan

KEGIATAN

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

ANGGARAN

Rp. 728.462.417.000*)

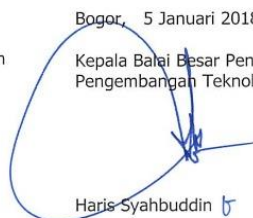
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



Muhammad Syakir

Bogor, 5 Januari 2018

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian



Haris Syahbuddin

*) Anggaran tersebut merupakan total seluruh BPTP dan BBP2TP, karena BBP2TP diberikan mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPTP.

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja per Tanggal 5 Juli 2018

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN Jalan Tentara Pelajar No.10, Bogor 16114 Telepon (0251) 8351277; Faksimili (0251) 8350928 WEBSITE: www.bbp2tp.litbang.pertanian.go.id ; E-MAIL: bbp2tp@yahoo.com, bbp2tp@litbang.pertanian.go.id</p>	
---	--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haris Syahbuddin
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syakir
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua



Muhammad Syakir

Bogor, 5 Juli 2018

Pihak Pertama



Haris Syahbuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian	1. Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	431 Paket Teknologi
		2. Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	34 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian	3 Nilai IKM
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	5 Temuan

KEGIATAN

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

ANGGARAN

Rp. 816.589.369.000*)

Bogor, 5 Juli 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian



Muhammad Syakir



Haris Syahbuddin

*) Anggaran tersebut merupakan total seluruh BPTP dan BBP2TP, karena BBP2TP diberikan mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPTP.

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja per bulan Desember 2018

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN</p><p><small>Jalan Tentara Pelajar No.10, Bogor 16114 Telepon (0251) 8351277; Faksimili (0251) 8350928 WEBSITE: www.bbp2tp.litbang.pertanian.go.id ; E-MAIL: bbp2tp@yahoo.com, bbp2tp@litbang.pertanian.go.id</small></p></div></div>
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Haris Syahbuddin Jabatan : Kepala BB Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Selanjutnya disebut pihak pertama</p> <p>Nama : Syukur Iwantoro Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="text-align: center;"><p>Pihak Kedua</p><p>Syukur Iwantoro</p></div><div style="text-align: center;"><p>Jakarta, Desember 2018</p><p>Pihak Pertama</p><p>Haris Syahbuddin</p></div></div>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian	1. Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	431 Paket Teknologi
		2. Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	34 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian	3 Nilai IKM
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	5 Temuan

KEGIATAN


Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

ANGGARAN

Rp. 824.460.053.000*)

Jakarta, Desember 2018

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



Syukur Iwantoro

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian



Haris Syahbuddin

*) Anggaran tersebut merupakan total seluruh BPTP dan BBP2TP, karena BBP2TP diberikan mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPTP.

Lampiran 5. Sertifikat Paten Sederhana Formula Minuman Penyegar Kopi Lada





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Ragunan No 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540 INDONESIA
Untuk Invensi dengan Judul	: FORMULA MINUMAN PENYEGAR KOPI LADA
Inventor	: Dr. Ir. Rubiyo, MSI Prof. Dr. Ir. Risdaheri, MSI Minas Tiurlina Panggabean, SP, M.Si Ria Maya, SP Irma Audiah Fachrista, SP, MM Dr. Suharyanto, SP, MP
Tanggal Penerimaan	: 08 Februari 2017
Nomor Paten	: IDS000001880
Tanggal Pemberian	: 10 Juli 2018

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Lampiran 6. Piagam Penghargaan Bupati Pelalawan Riau atas kerjasamanya dalam Pengembangan Perbenihan Padi di Kabupaten Pelalawan



Lampiran 7. Sertifikat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018



Lampiran 8. Sertifikat Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2

